

***THE EFFECT OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT AND
POPULATION ON REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN EAST NUSA
TENGGERA PROVINCE***

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH di
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

¹Maromi M. Mbate

¹Ibumaromi32@gmail.com

²Melvin K. Djami Rane

²melvindjamirane@gmail.com

^{1,2} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Artha Wacana

Abstract

This study examines the influence of Gross Regional Domestic Product and population on Regional Original Revenue in East Nusa Tenggara Province. Using a quantitative approach with a causal associative design, the study analyzes secondary time-series data from 2013 to 2022 obtained from official statistical publications. The data were processed using multiple linear regression with a double-log specification to assess both simultaneous and partial effects. The results indicate that Gross Regional Domestic Product and population jointly exert a significant influence on Regional Original Revenue. However, partial testing shows that neither Gross Regional Domestic Product nor population has a statistically significant effect on Regional Original Revenue. The adjusted coefficient of determination suggests that the model explains a substantial proportion of the variation in Regional Original Revenue, while the remainder is attributable to other unobserved factors. These findings imply that regional revenue performance in East Nusa Tenggara is not determined solely by economic output and demographic growth, but also by the effectiveness of fiscal administration, local tax collection capacity, and the optimization of regional economic potential.

Keywords: GRDP, Regional Original Revenue, Fiscal Performance

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal berdasarkan data sekunder runtut waktu tahun 2013–2022 yang diperoleh dari publikasi resmi statistik daerah. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan spesifikasi model double log untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa baik Produk Domestik Regional Bruto maupun jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai koefisien determinasi tersesuaian menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan dinamika demografis, tetapi juga oleh efektivitas administrasi fiskal, kapasitas pemungutan pajak daerah, dan optimalisasi potensi ekonomi daerah.

Kata Kunci: PDRB, PAD, Kinerja Fiskal

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan

bertanggung jawab. Peranan PAD dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolok ukur penting pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka semakin besar pula jumlah keuangan daerah yang tersedia untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran hasil kerja pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat, yang dapat diartikan sebagai proses kenaikan pendapatan suatu daerah. Salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan dan kinerja perekonomian suatu daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh Sukirno, (2004) dan ditegaskan kembali dalam kajian ekonomi wilayah terkini oleh Badan Pusat Statistik, (2024). Pertumbuhan ekonomi daerah akan berdampak pada hasil pendapatan daerah; apabila pertumbuhan ekonominya baik maka akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah, dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tinggi rendahnya nilai PDRB yang diperoleh daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Juwita dan Widia, (2022).

Jumlah penduduk turut memengaruhi besaran PAD; ketika jumlah penduduk meningkat, semakin banyak pula masyarakat yang berbelanja, sehingga banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan mendorong perkembangan usaha di daerah tersebut, dan ketika usaha semakin berkembang maka jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah juga semakin tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh Afifah, (2018). Pendapat ini sejalan dengan Adriani dan Handayani, (2008) serta Afdal, (2021).

Mengetahui besaran pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD penting untuk keperluan estimasi perubahan PAD yang ditimbulkan oleh perubahan PDRB dan jumlah penduduk. Apabila terjadi penurunan PDRB dan jumlah penduduk, maka hal ini akan berdampak buruk terhadap PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Perkembangan PAD Provinsi NTT tahun 2019–2023 menunjukkan adanya fluktuasi, dengan PAD meningkat dari Rp1.258.958,95 juta (2019) menjadi Rp1.363.737,98 juta (2022) dan Rp2.139.341,05 juta (2023), setelah sempat menurun menjadi Rp1.165.570,59 juta pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pola serupa juga terlihat pada PDRB dan jumlah penduduk Provinsi NTT pada periode yang sama, yang sama-sama sempat berkontraksi pada tahun 2020 sebelum kembali meningkat, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, (2024).

Studi empirik ekonomi regional yang mengaitkan PDRB dan jumlah penduduk dengan PAD sudah cukup banyak dilakukan, namun memberikan hasil yang berbeda-beda. Adriani dan Handayani, (2008) pada Kabupaten Merangin menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara parsial. Saldi, Zulgani, dan Nurhayani, (2021) di Kabupaten Kerinci menemukan bahwa secara simultan PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD, namun secara parsial hanya PDRB yang berpengaruh signifikan. Ariyani, (2018) menemukan bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan pajak hotel berpengaruh signifikan positif terhadap PAD. Sebaliknya, Juwita dan Widia, (2022) di Provinsi Sumatera Barat menemukan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD, demikian pula Mbate dan Tanebet, (2023) di Kabupaten Kupang yang menemukan bahwa PDRB dan belanja langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Juliansyah dan Sukandria, (2018) di Kabupaten Simeulue menemukan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD, sedangkan PDRB berpengaruh positif. Susanto, (2014) di Kota Malang menemukan

bahwa PDRB dan jumlah penduduk secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. Ketidakkonsistenan ini juga tampak pada penelitian yang lebih baru: Nashiruddin dan Witono, (2024) pada kabupaten/kota di Jawa Tengah menemukan PDRB berpengaruh signifikan namun jumlah penduduk tidak, sedangkan Naraswari, Manan, dan Agustiani, (2024) di Provinsi NTB serta Jasmine, (2024) di Provinsi DIY menemukan bahwa jumlah penduduk (atau kepadatan penduduk) justru berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan penelitian empirik dengan hasil yang berbeda-beda tersebut, penulis mengadopsi penelitian dengan judul "Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap PAD di Provinsi NTT", dengan rumusan masalah: (1) apakah PDRB berpengaruh terhadap PAD di Provinsi NTT, dan (2) apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD di Provinsi NTT.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi NTT.

Pendapatan Asli Daerah

Nurcholis, (2017) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dalam satuan rupiah per tahun. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sebagaimana dikemukakan oleh Baldric, (2017).

Nurkholis dan Khusaini (dalam Juwita dan Widia, 2022) menjelaskan bahwa PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD bersumber dari: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah, yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba badan usaha milik daerah dan hasil penyertaan modal/investasi daerah; dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, seperti pendapatan jasa giro, pendapatan bunga, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah. Keempat sumber tersebut bertujuan memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan gambaran perekonomian secara menyeluruh di suatu daerah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang dihasilkan oleh suatu wilayah, yang umumnya dihitung atas dasar harga berlaku, namun untuk melihat perkembangannya dari tahun ke tahun harus dinyatakan dalam bentuk harga konstan (riil), sebagaimana dijelaskan dalam kajian ekonomi wilayah oleh Badan Pusat Statistik, (2024).

PDRB menjadi tolok ukur pendapatan masyarakat yang berkaitan dengan PAD, karena semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuannya membayar pajak sesuai dengan prinsip kemampuan membayar (ability to pay). Prinsip ini juga menjadi salah satu asas yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa penetapan pajak daerah harus mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan membayar wajib pajak, sebagaimana ditegaskan pula oleh Pangaribuan, (2022). Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar kemampuan masyarakat daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah.

PDRB adalah jumlah nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah domestik suatu daerah sebagai hasil kegiatan perekonomian selama jangka waktu tertentu, tanpa memperhitungkan unsur-unsur produksi yang dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk daerah tersebut, dengan tiga pendekatan penghitungan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan, sebagaimana dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik, (2024). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah, PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan ekonomi secara riil, distribusi PDRB menurut lapangan usaha menggambarkan struktur ekonomi daerah, sedangkan PDRB per kapita menggambarkan besaran nilai tambah dan pertumbuhan kesejahteraan ekonomi per penduduk suatu wilayah, sebagaimana dijelaskan pula oleh Badan Pusat Statistik, (2024).

Jumlah Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada di suatu daerah/wilayah, saling berkomunikasi satu dengan yang lain, dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut. Kepadatan penduduk suatu wilayah dihitung dengan membagi jumlah total penduduk dengan luas wilayah tempat penduduk tersebut tinggal, sebagaimana dikemukakan oleh Juliansyah, (2018).

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang membedakan pendapatan antardaerah. Peningkatan jumlah penduduk dibutuhkan dan bukan merupakan suatu masalah, melainkan dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi apabila diikuti dengan perencanaan pembangunan yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Ariyani, (2018). Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang produktif maupun tidak produktif.

Keterkaitan PDRB dan PAD

Hubungan antara PDRB dan PAD merupakan hubungan fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB, sebagaimana dikemukakan oleh Purbayu dan Retno, (2005), dan dikuatkan pula oleh kajian yang lebih baru, yang menemukan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD (Nashiruddin & Witono, 2024; Naraswari dkk., 2024). PDRB merupakan cerminan produktivitas ekonomi suatu daerah; produktivitas ekonomi yang tinggi memberi peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pungutan berupa pajak dan retribusi. Dengan demikian, jika PDRB sebagai cerminan produktivitas ekonomi suatu daerah meningkat, maka PAD akan meningkat pula.

Keterkaitan Jumlah Penduduk dan PAD

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang memengaruhi PAD. Apabila suatu daerah memiliki penduduk yang banyak, maka proses pembangunan daerah tersebut dapat semakin cepat terlaksana, sedangkan apabila suatu daerah memiliki penduduk yang sedikit, maka pembangunan di daerah tersebut akan semakin lambat, karena yang membayar pajak pada dasarnya adalah masyarakat itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Juliansyah, (2018). Temuan yang lebih baru turut menegaskan keterkaitan ini, yaitu bahwa jumlah penduduk menjadi salah satu determinan penting PAD pada level kabupaten/kota, sebagaimana ditemukan oleh Edira dan Hermanto, (2023).

Hipotesis Penelitian

PAD merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah dan Sukandria, (2018) menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian Adriani dan Handayani, (2008), Saldi, Zulgani, dan Nurhayani, (2021), serta Ariyani, (2018). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang memengaruhi PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani, (2018) menyimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap PAD; banyak sedikitnya jumlah penduduk berpengaruh pada tinggi rendahnya PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto, (2014). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus (case study) yang bersifat asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh antarvariabel berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, (2022). Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini difokuskan pada satu unit analisis, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan mengamati perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada rentang waktu tertentu guna menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan.

Subjek penelitian ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unit analisis, sedangkan objek penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT selama periode tahun 2013 sampai dengan 2022.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan cakupan data yang dianalisis meliputi periode tahun 2013 sampai dengan 2022.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar dokumentasi data, yaitu instrumen yang digunakan untuk mencatat dan mentabulasi data sekunder PDRB, jumlah penduduk, dan PAD Provinsi NTT yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS 21.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data tahunan PDRB, jumlah penduduk, dan PAD Provinsi NTT yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. Sampel

penelitian ditentukan dengan teknik sampling jenuh (total sampling), yaitu seluruh data runtut waktu tahunan periode 2013 sampai dengan 2022 digunakan sebagai sampel, dengan pertimbangan bahwa periode tersebut merupakan data terkini dan lengkap yang tersedia pada lima edisi publikasi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka dan Statistik Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu tahun terbitan 2015, 2018, 2020, 2022, dan 2024.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe runtut waktu (time series) tahunan, mencakup data PDRB, jumlah penduduk, dan PAD Provinsi NTT dari tahun 2013 hingga 2022. Sumber data diperoleh dari publikasi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka dan Statistik Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, dengan tahun terbitan 2015, 2018, 2020, 2022, dan 2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mencatat, menyusun, dan mentabulasi data sekunder yang telah dipublikasikan secara resmi oleh instansi terkait, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, (2022).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis regresi, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi, sebagaimana diuraikan berikut.

Untuk menganalisis pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD Provinsi NTT digunakan analisis regresi linier berganda. Mengingat variabel PAD dan PDRB memiliki satuan rupiah, sedangkan jumlah penduduk memiliki satuan jiwa, serta untuk menstabilkan varians data dan memudahkan interpretasi koefisien sebagai elastisitas, persamaan regresi yang digunakan berbentuk model double logaritma (log-log), sebagaimana dikemukakan oleh Adriani dan Handayani, (2008) dan Gujarati dan Porter, (2010), sebagai berikut.

$$\ln Y = \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + e$$

Keterangan:

Y = PAD (rupiah)

α = konstanta

1 = PDRB (rupiah)

2 = jumlah penduduk (jiwa)

1, β_2 = koefisien regresi (elastisitas) masing-masing variabel bebas

e = error term

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi terlebih dahulu diuji dengan uji asumsi klasik untuk memastikan model bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), sebagaimana dikemukakan oleh Ghazali, (2018). Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas untuk menguji apakah residual model berdistribusi normal, uji multikolinearitas untuk menguji ada tidaknya korelasi antarvariabel bebas melalui nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varians residual antarpengamatan, serta uji autokorelasi untuk menguji ada tidaknya korelasi antara residual pada periode tertentu dengan residual periode sebelumnya, mengingat data yang digunakan bersifat time series.

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji F (uji simultan) dan uji t (uji parsial). Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, dengan kriteria pengujian pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ sebagai berikut: apabila nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan apabila nilai signifikansi $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan kriteria pengujian pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ sebagai berikut: apabila nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan apabila nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R^2 berada pada rentang nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin baik pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun. Perkembangan PAD, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan jumlah penduduk Provinsi NTT periode 2013–2022 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan PAD, PDRB, dan Jumlah Penduduk Provinsi NTT

Tahun 2013–2022							
Tahun	PAD (Rp)	(Ribu Pertumbuhan (%))	PDRB (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)	
2013	528.832.134	-	61.352.300	-	4.953.967	-	
2014	763.337.478	44,34	68.500.400	11,65	5.036.897	1,67	
2015	882.315.240	15,59	76.120.790	11,12	5.120.061	1,65	
2016	995.186.121	12,79	83.742.790	10,01	5.203.514	1,63	
2017	1.047.491.567	5,26	90.758.930	8,38	5.287.302	1,61	
2018	1.095.269.979	4,56	98.930.190	9,00	5.371.520	1,59	
2019	1.258.958.953	14,95	106.731.760	7,89	5.456.200	1,58	
2020	1.165.570.596	(7,42)	106.482.450	(0,23)	5.325.570	(2,39)	
2021	1.238.032.648	6,22	110.881.410	4,13	5.387.740	1,17	
2022	1.363.737.981	10,15	118.718.200	7,07	5.466.290	1,46	
Rerata	1.033.873.269	12	92.221.922	8	5.260.906	1	

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1, PAD Provinsi NTT secara nominal terus meningkat setiap tahun kecuali pada tahun 2020, namun laju pertumbuhannya melambat secara konsisten dari 44,34 persen pada tahun 2014 menjadi 4,56 persen pada tahun 2018, sebelum kembali meningkat menjadi 14,95 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, PAD mengalami kontraksi sebesar 7,42 persen sebagai dampak pandemi COVID-19, kemudian kembali tumbuh sebesar 6,22 persen pada tahun 2021 dan 10,15 persen pada tahun 2022, meskipun laju pertumbuhan tersebut masih berada di bawah rerata

pertumbuhan PAD selama sepuluh tahun terakhir yang mencapai 12 persen. Peningkatan PAD pada periode tersebut bersumber terutama dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

PDRB Provinsi NTT secara nominal juga terus meningkat setiap tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi tipis sebesar 0,23 persen akibat pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan PDRB melambat secara bertahap dari 11,65 persen pada tahun 2014 menjadi 7,89 persen pada tahun 2019, sebelum terkontraksi pada tahun 2020, kemudian kembali tumbuh sebesar 4,13 persen pada tahun 2021 dan 7,07 persen pada tahun 2022, namun belum kembali ke rerata pertumbuhan sepuluh tahun sebesar 8 persen. Kontribusi PDRB terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor administrasi pemerintahan; sektor perdagangan; serta sektor konstruksi.

Jumlah penduduk Provinsi NTT secara nominal turut meningkat setiap tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 2,39 persen. Laju pertumbuhan penduduk melambat secara bertahap dari 1,67 persen pada tahun 2014 menjadi 1,58 persen pada tahun 2019, sebelum terkontraksi pada tahun 2020, kemudian kembali tumbuh sebesar 1,17 persen pada tahun 2021 dan 1,46 persen pada tahun 2022, masih berada di bawah rerata pertumbuhan sepuluh tahun sebesar 1 persen. Peningkatan jumlah penduduk berpotensi mendorong peningkatan penerimaan daerah apabila penduduk diberdayakan dan dikelola dengan baik melalui peningkatan keterampilan.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 21, diperoleh hasil regresi linier berganda model double logaritma sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta (C)	-46,806	-1,073	0,319
Ln PDRB (X1)	0,743	1,190	0,273
Ln Jumlah Penduduk (X2)	3,268	0,802	0,449

Sumber: data diolah, 2025 (Adjusted R² = 0,913; F-statistik = 48,378; Sig. F = 0,000)

Berdasarkan Tabel 2, persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut.

$$\text{Ln PAD} = -46,806 + 0,743 \text{ Ln PDRB} + 3,268 \text{ Ln JP}$$

Koefisien PDRB dan jumlah penduduk dalam model double logaritma merupakan nilai elastisitas. Nilai elastisitas PDRB sebesar 0,743 berarti bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 10 persen berasosiasi dengan kenaikan PAD sebesar 7,43 persen, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Nilai elastisitas jumlah penduduk sebesar 3,268 berarti bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 10 persen berasosiasi dengan kenaikan PAD sebesar 32,68 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil pengujian statistik uji F pada Tabel 2 menunjukkan nilai F-hitung sebesar 48,378 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (Sig. F 0,000 < 0,05). Berdasarkan kriteria pengujian, H₀ ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel PDRB dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi NTT.

Hipotesis pertama (H₁) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 2, nilai signifikansi PDRB sebesar 0,273 lebih besar

dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (Sig. t 0,273 > 0,05), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi NTT.

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 2, nilai signifikansi jumlah penduduk sebesar 0,449 lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (Sig. t 0,449 > 0,05), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi NTT.

Nilai Adjusted R^2 pada Tabel 2 sebesar 0,913 atau 91,3 persen, menunjukkan bahwa variasi PAD Provinsi NTT mampu dijelaskan oleh variabel PDRB dan jumlah penduduk secara bersama-sama sebesar 91,3 persen, sedangkan sisanya sebesar 8,7 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD di Provinsi NTT (Sig. t = 0,273 > 0,05), meskipun arah koefisiennya tetap positif. Temuan ini belum sejalan dengan hubungan fungsional PDRB-PAD yang dikemukakan oleh Purbayu dan Retno, (2005), yang menyatakan bahwa peningkatan produktivitas ekonomi daerah akan memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Juwita dan Widia, (2022) serta Mbate dan Tanebet, (2023) yang juga menemukan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sebaliknya, temuan ini berbeda dengan pandangan Prasedyawan (dalam Juliansyah, 2018) yang menyatakan bahwa PDRB merupakan faktor utama pendorong PAD, karena peningkatan PDRB secara langsung mendorong peningkatan pajak daerah.

Data perkembangan PDRB dan PAD Provinsi NTT tahun 2013–2022 pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kedua variabel bergerak searah pada seluruh periode pengamatan, yaitu sama-sama tumbuh maupun sama-sama berkontraksi pada tahun yang sama. Meskipun demikian, proporsi perubahannya tidak konsisten: pada periode 2014–2016 dan 2019–2022 pertumbuhan PAD melebihi pertumbuhan PDRB, sedangkan pada periode 2017–2018 pertumbuhan PDRB justru melebihi pertumbuhan PAD. Ketidaksebandingan besaran perubahan inilah yang turut menjelaskan mengapa pengaruh PDRB terhadap PAD tidak signifikan secara statistik meskipun arah hubungan keduanya tetap positif. Saldi, Zulgani, dan Nurhayani, (2021) menyatakan bahwa diperlukan dorongan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan PDRB agar berdampak pada peningkatan PAD, sejalan dengan kebutuhan penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, dan konstruksi di Provinsi NTT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD di Provinsi NTT (Sig. t = 0,449 > 0,05). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Adriani dan Handayani, (2008) serta Juliansyah dan Sukandria, (2018). Namun demikian, temuan ini tidak sejalan dengan pandangan Simanjuntak (dalam Saldi, Zulgani, & Nurhayani, 2021) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan penerimaan daerah, karena penduduk merupakan sumber daya utama penggerak perekonomian suatu daerah.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan PAD Provinsi NTT bergerak searah pada seluruh periode pengamatan, namun dengan skala perubahan yang sangat tidak proporsional. Pertumbuhan jumlah penduduk relatif stabil pada kisaran 1,17 hingga 1,67 persen

per tahun, kecuali kontraksi sebesar 2,39 persen pada tahun 2020, sedangkan pertumbuhan PAD jauh lebih fluktuatif, berkisar antara 4,56 hingga 44,34 persen di luar tahun kontraksi 2020. Perbedaan skala fluktuasi yang tajam antara kedua variabel inilah yang turut menjelaskan mengapa jumlah penduduk secara statistik belum mampu menjelaskan variasi PAD secara signifikan. Peningkatan jumlah penduduk berpotensi mendorong penerimaan daerah apabila diikuti dengan peningkatan keterampilan dan produktivitas penduduk, namun tanpa upaya pemberdayaan tersebut, peningkatan jumlah penduduk semata tidak

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk secara bersama-sama memiliki peran penting dalam menjelaskan perkembangan PAD Provinsi NTT selama periode 2013–2022, namun apabila ditelaah secara terpisah, baik PDRB maupun jumlah penduduk belum menjadi faktor penentu utama naik turunnya PAD. Perkembangan PDRB, jumlah penduduk, dan PAD memang bergerak searah sepanjang periode pengamatan, namun besaran perubahan ketiganya tidak sebanding, di mana PAD cenderung berfluktuasi jauh lebih tajam dibandingkan PDRB maupun jumlah penduduk, sehingga kenaikan PDRB atau bertambahnya jumlah penduduk saja belum cukup untuk mendorong peningkatan PAD secara nyata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD Provinsi NTT lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain di luar PDRB dan jumlah penduduk, seperti kapasitas pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan potensi ekonomi dan kependudukan yang belum optimal.

Berdasarkan simpulan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT diharapkan dapat mendorong peningkatan PDRB dari berbagai sektor unggulan serta memberikan pembekalan keterampilan tambahan bagi penduduk, agar pertumbuhan ekonomi dan kependudukan yang terjadi dapat lebih optimal diterjemahkan menjadi peningkatan PAD; sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan dan menambahkan variabel-variabel lain yang relevan, seperti kapasitas administrasi perpajakan daerah atau realisasi investasi, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan PAD di Provinsi NTT. serta merta diterjemahkan menjadi peningkatan PAD yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, & Handayani. (2008). Pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2).
- Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan pajak hotel terhadap PAD. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(1).
- Artana, I. W., & Karmini, N. L. (2024). Pengaruh PDRB, jumlah penduduk bekerja, dan upah minimum terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 7670–7680. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29729>
- Atmaja, Y. (2007). *Kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung dalam membiayai pembangunan daerah di era otonomi*.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2015). *Nusa Tenggara Timur dalam angka 2015*. BPS Provinsi NTT.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2018). *Nusa Tenggara Timur dalam angka 2018*. BPS Provinsi NTT.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2020). *Nusa Tenggara Timur dalam angka 2020*. BPS Provinsi NTT.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2022). *Nusa Tenggara Timur dalam angka 2022*. BPS Provinsi NTT.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Nusa Tenggara Timur dalam angka 2024*. BPS Provinsi NTT.
- Bahl, R., & Bird, R. M. (2018). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries: Development from below*. Edward Elgar Publishing.
- Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Dasar-dasar ekonometrika* (E. Mardanugraha, S. Sungkono, & C. Wardani, Terj., Edisi 5). Salemba Empat.
- Jasmine. (2024). Analisis pengaruh kepadatan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY tahun 2013–2022. *JER (Jurnal Ekonomi Regional)*, 16(1), 49–63. <https://doi.org/10.31315/jer.v16i1.13064>
- Juliansyah, & Sukandria. (2018). Pengaruh total penduduk dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Regional Ekonomi Unimal*, 1(2).
- Juwita, R., & Widia, A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *LAND Journal*, 3(1), 69–76.
- Manane, D. R. (2021). ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH DARI ASPEK RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *IE : Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 3(1), 24–30. <https://jurnal.unimor.ac.id/index.php/JIE/article/view/1401>
- Mbate, M., & Tanebet, S. (2023). Pengaruh PDRB dan belanja langsung terhadap PAD (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Kupang). *AMARTHA: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(1).
- Naraswari, N. N. W., Manan, A., & Agustiani, E. (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, jumlah penduduk, dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB tahun 2010–2022. *JMM UNRAM*, 13(1), 100–117. <https://doi.org/10.29303/jmm.v13i1.811>
- Nashiruddin, A., & Witono, B. (2024). Pengaruh PDRB, investasi, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2), 3115–3127. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.8661>

- Nurcholis, H. (2017). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo
- Saldi, Zulgani, & Nurhayani. (2021). Analisis pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(3).
- Santoso, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 9–18.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, I. (2014). Analisis pengaruh PDRB, penduduk, dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2004). *[Dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022]*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022).
- Zariyah, A., dkk. (2021). *Ekonometrika (Teknik dan aplikasi dengan SPSS)*. Mandala Press.